

PERILAKU MEMILIH PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMILU 1999

(STUDI DESKRIPTIF TENTANG PERILAKU MEMILIH PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMDA KABUPATEN BOJONEGORO,
JAWA TIMUR, PADA PEMILU 1999)

SKRIPSI



OLEH :

Panji Ariyo Kusumo

NIM : 079514780

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A

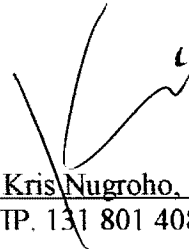
2002

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 15 Mei 2002

Dosen Pembimbing Skripsi



Drs. Kris Nugroho, MA
NIP. 131 801 408

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 31 Mei 2002

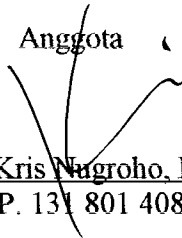
Panitia Penguji terdiri dari

Ketua



Drs. Priyatmoko, MA
NIP. 130 937 952

Anggota



Drs. Kris Nugroho, MA
NIP. 131 801 408

Anggota



Drs. Wisnu Pramutanto, MSi
NIP. 131 453 124

ABSTRAKSI

Penelitian dan Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku memilih Pegawai Negeri Sipil pada Pemilu 1999, baik dari segi arah pilihan politiknya dan hubungan variabel status sosial ekonomi, sosialisasi politik, pengetahuan politik, pertimbangan rasional, identifikasi partai serta sikap politik dengan perilaku memilih mereka. Selanjutnya juga digambarkan pergeseran pilihan politik PNS antara Pemilu 1997 dengan Pemilu 1999, baik dari segi arah pergeseran, besarnya pergeseran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran pilihan politik mereka.

Fenomena umum yang ada pada masa Orde Baru menunjukkan terdapatnya anggapan adanya asosiasi antara PNS dengan pilihan politik ke Golkar. PNS diwajibkan menjadi anggota Golkar dan memberikan suaranya ke Golkar. Dari sini PNS dijadikan ujung tombak keberhasilan Golkar terutama dalam pemilu. Tetapi pada kenyataannya pada masa itu pilihan politik mereka juga terdistribusi ke PPP dan PDI, bahkan Golput. Berbeda dengan pemilu pada masa Orde Baru, perilaku memilih PNS pada Pemilu 1999 dimana dilaksanakan dalam euphoria politik cenderung mengalami perubahan. Hal ini berkaitan dengan Pemilu 1999 yang dilaksanakan dalam suasana multi partai, tingkat partisipasi pemilihnya tinggi, adanya keragaman ideologi dan kebebasan politik yang tinggi. Selain itu peraturan perundang-undangan pemilu yang barupun relatif dapat menjamin pelaksanaan pemilu secara jujur.

Sumber data utama diperoleh melalui penyebaran kuisioner pada 85 responden yaitu PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Bojonegoro, yang dipilih secara acak dan incidental melalui pengambilan sampel gugus bertahap. Karena 4 kuisioner rusak, sampelnya menjadi 81 orang. Dari keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan memberikan tafsiran-tafsiran logis dan interpretasi teoritik melalui penggunaan teori partisipasi politik, pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional. Analisa secara kuantitatif dilakukan melalui analisa tabulasi silang.

Dari hasil analisa diperoleh suatu kesimpulan bahwa pilihan politik PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Bojonegoro terdistribusi ke PDI-P (21%), PKB (13,6%), Golkar (46,9%), PAN (17,3%), dan PK (1,2%). Secara umum status sosial ekonomi, sosialisasi politik yang diperoleh melalui media massa, dan penilaian atas isu politik cukup kuat pengaruhnya terhadap perilaku memilih responden. Sedangkan pengaruh penilaian atas program parpol dan kandidat/calon dari OPP terhadap perilaku memilih pemilih PDI-P, PKB, dan Golkar tidak begitu kuat, tetapi pengaruh faktor tersebut pada pemilih PAN dan PK cukup kuat. Selanjutnya pengaruh identifikasi partai terhadap perilaku memilih sebagian besar pemilih PDI-P, PKB, PAN, dan PK serta pada sebagian kecil pemilih Golkar cukup kuat. Selain itu sikap politik juga berpengaruh terhadap perilaku memilih sebagian responden pemilih OPP tertentu.

Pergeseran pilihan politik terjadi pada responden yang pada Pemilu 1997 memilih PPP dan Golkar. Pada Pemilu 1999 semua responden pemilih PPP, pilihan politiknya bergeser ke PKB (7,4%), Partai Golkar (2,5%), PDI-P (3,7%), dan PAN (4,9%). Sedangkan pada responden pemilih Golkar, pada Pemilu 1999 pilihan politiknya bergeser ke PKB (6,2%), PDI-P (9,9%), PAN (11,1%), dan PK (1,2%). Tetapi penurunan suara Golkar tersebut dari Pemilu 1997 ke Pemilu 1999 tidak terlalu besar (35,6%) dan hal ini menunjukkan masih tingginya loyalitas mereka.

Pergeseran pilihan politik pemilih PPP ke PKB dan PAN terutama dikarenakan adanya parpol-parpol yang mengandalkan basis massa dan tokoh Islam, sedangkan pergeseran pilihan politik pemilih PPP ke PDI-P lebih dikarenakan adanya parpol yang mengandalkan basis massa kaum nasionalis dengan orientasi politik sekuler (bersifat nasionalistik). Pergeseran pilihan politik mereka ke PKB, PAN, dan PDI-P juga dipengaruhi oleh afiliasi politik tokoh panutan serta isu-isu politik yang diangkat OPP. Sedangkan mereka yang pilihan politiknya bergeser ke Golkar lebih dikarenakan adanya unsur paksaan/mobilisasi (dari atasan) dan afiliasi politik keluarga mereka ke Golkar.

Pergeseran pilihan politik pemilih Golkar ke PKB, PDI-P, PAN, dan PK terutama dikarenakan adanya keterbukaan/kebebasan politik dan persepsi bahwa parpol-parpol masa Orde Baru tidak lagi sesuai dengan semangat reformasi. Mereka yang pilihan politiknya bergeser ke PKB dan PAN juga dipengaruhi cukup kuat oleh adanya parpol yang mengandalkan basis massa dan tokoh Islam. Dan yang pilihan politiknya bergeser ke PK juga dipengaruhi cukup kuat oleh adanya parpol yang berideologi Islam. Adanya parpol yang mengandalkan basis massa kaum nasionalis dengan orientasi politik sekuler juga berpengaruh kuat pada pergeseran pemilih Golkar ke PDI-P.